

ABSTRAK

Vahrullah H Selang, “Tanggung Jawab Hukum Pedagang Eceran Atas Penjualan Obat Bebas Terbatas Tanpa Asisten Apoteker” di bimbing oleh Mardia Ibrahim dan Iyam Irahlatmi Kaharu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh pedagang eceran tanpa asisten apoteker, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pedagang eceran atas penjualan obat bebas terbatas tanpa asisten apoteker. Penelitian ini dilaksanakan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota ternate dan kepada pedagang eceran di kelurahan salahuddin, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Berdasarkan hasil penelitian 5 (lima) pelaku usaha pedagang eceran di kelurahan salahuddin, tidak memiliki izin usaha obat-obatan serta tidak memiliki asisten apoteker sebagai penanggung jawab di bidang kefarmasian, yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota ternate, sehingga dampak atau kerugian terjadi kepada masyarakat atau konsumen yang mengonsumsi obat bebas terbatas, adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sebagai pedagang eceran obat-obatan harus mengantongi izin usaha serta asisten apoteker sebagai penanggung jawab dan melaksanakan kewibannya sebagai pelaku usaha sebagai mana termaktub dalam undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah No 51 tentang pekerjaan kefarmasian serta keputusan menteri republik Indonesia No 1331 tahun 2002 pasal 4 sehingga konsumen atau masyarakat terhindar dari kerugian atas kesalahan dan kelalaian pelaku usaha pedagang eceran.

Kata kunci : tanggungjawab asisten apoteker

“ABSTRACT: Vahrullah H Selang, “Retail Merchant's Legal Responsibility for Selling Limited Over-the-counter Medicines Without Pharmacist Assistants” was guided by Mardia Ibrahim and Iyam Irahatmi Kaharu.

This study aims to determine the legal responsibilities that must be carried out by retail traders without pharmacist assistants, and to find out the legal consequences for retail traders for limited over-the-counter drug sales without pharmacist assistants. This research was carried out at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Ternate City and to retail traders in Salahuddin Village, this study used empirical research methods.

Based on the results of the study, 5 (five) retail sword business actors in the Salahuddin Village, do not have a drug business license and do not have a pharmacist assistant in charge of the pharmaceutical sector, which are published by the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Ternate City. the impact or loss occurs to the public or consumers who consume limited over-the-counter drugs, while the data sources used are secondary data and primary data. Data collection is used by means of library research, observation, interviews and documentation studies. After the data is collected, it is analyzed qualitatively and descriptively to get a conclusion.

Based on the data analysis carried out, it was concluded that as a drug retailer, you must have a business license as well as a pharmacist assistant as the person in charge and carry out their duties as a business actor as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and the law No. 36 of 2009 concerning health and government regulation No. 51 concerning pharmaceutical work and the decision of the minister of the Republic of Indonesia No. 1331 of 2002 article 4 so that consumers or the public are protected from losses due to mistakes and negligence of retail traders.

Keywords: Pharmacist, Assistan, Responsibility”